

P-ISSN : 2598-5094

E-ISSN : 2656-1999

# TIBANNDARU

Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi

**Volume 3 Nomor 1 April 2019**

Memposisikan Pustakawan di Perpustakaan Daerah Dalam Pengembangan E-Government

**Bambang Prakoso**

*Leaders of Public Service Organizations: Improve Library Excellent Service*

**Daniel P. Hutapea**

Menelusur Jejak Sejarah Perkembangan Penerbitan Buku Islam di Indonesia

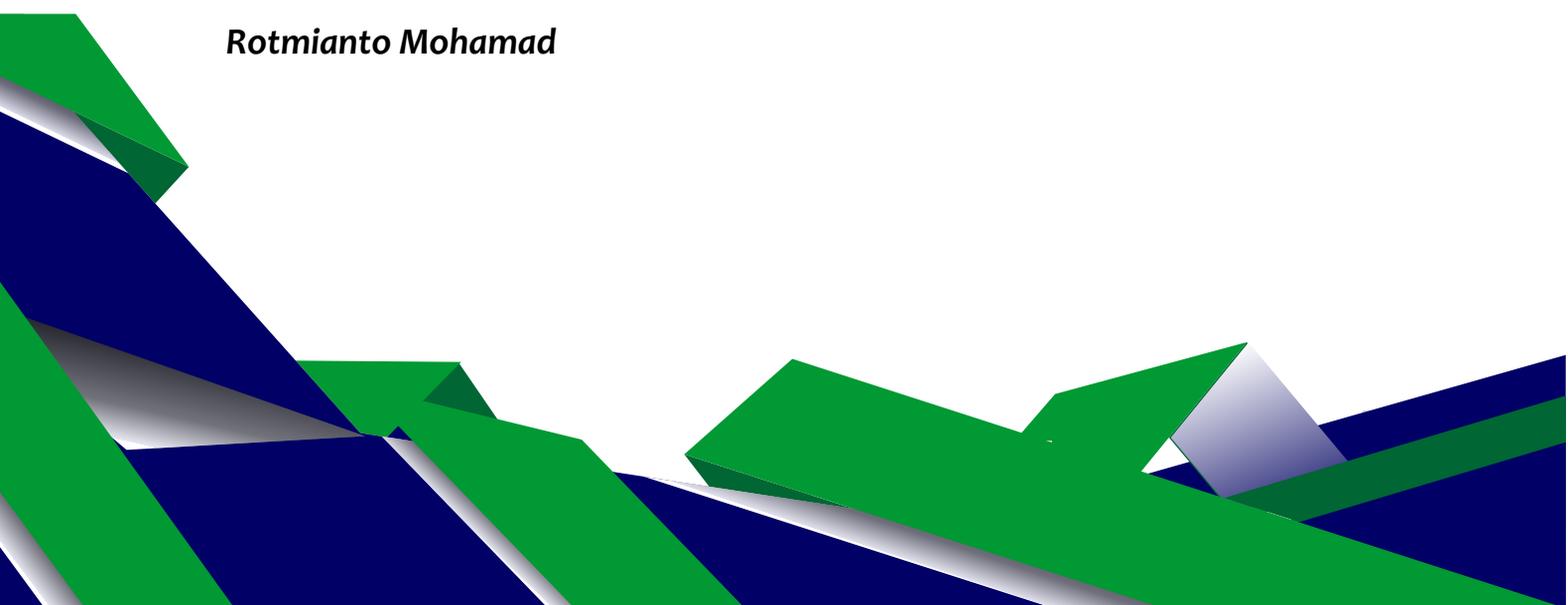
**Dian Kristyanto**

Impelementasi Kebijakan Akses *Fulltext* Karya Ilmiah Dosen Pada Repositori Institusi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan

**Hairul Agust Cahyono**

Freeware e-Class untuk Memudahkan Siapa Saja Mengklasifikasi dan Memahami Sistem Klasifikasi Berbasis DDC

**Rotmianto Mohamad**





# TIBANDARU

## JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

### HALAMAN PENANGGUNG JAWAB

#### **Pelindung**

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

#### **Penasehat**

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

#### **Penanggung Jawab**

Fahriyah, S.Sos., MA

#### **Pemimpin Redaksi**

Drs. Bakhtiyar, S.Sos., M.IP.

#### **Redaksi Pelaksana**

Drs. Yudi Harianto Cipta U., M.IP.,  
Drs. Ahmad Sufaidi, M.IP., Dra. Christine Lucia Mamuaya, M.IP., Drs. Bakhtiyar, S.Sos.,  
M.IP., Fahriyah, S.Sos., MA., Yanuastrid, Shintawati, S.IPI., M.Si., Rr. Siti Dwijati, S.Sos.,  
M.Si., Dra. Heddy Poerwandari, M.IP., Wahyu Kuncoro, S.IP., M.IP. Bambang Prakoso,  
S.Sos., M.IP., Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

#### **Mitra Bestari**

Imas Maesaroh, P.Hd.  
(Pakar Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)  
Ida Fajar Priyanto, P.Hd.  
(Pakar Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)  
Dra. Munawaroh, M.Si.  
(Kepala Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya)  
Fahriyah, S.Sos., M.A.  
(Dosen Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

#### **Produksi**

Munari, Hendro

#### **Distribusi**

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Perpustakaan

Terbit setiap : April dan Oktober

#### **Alamat Sekretaris/Redaksi**

Jurusan Ilmu Perpustakaan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.  
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Telp. (031) 5677577. Website: [jipfisip.uwks.ac.id](http://jipfisip.uwks.ac.id).  
Email: [JIPFisip.@uwks.ac.id](mailto:JIPFisip.@uwks.ac.id).



# TIBANDARU

## JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

### DAFTAR ISI

HALAMAN PENANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI .....	ii
SEKAPUR SIRIH .....	iii
Memposisikan Pustakawan di Perpustakaan Daerah Dalam Pengembangan E-Government <i>Bambang Prakoso</i> .....	1
<i>Leaders of Public Service Organizations: Improve Library Excellent Service</i> <i>Daniel P. Hutapea</i> .....	16
Menelusur Jejak Sejarah Perkembangan Penerbitan Buku Islam di Indonesia <i>Dian Kristyanto</i> .....	30
Implementasi Kebijakan Akses <i>Fulltext</i> Karya Ilmiah Dosen pada Repositori Institusi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan <i>Hairul Agust Cahyono</i> .....	41
<i>Freeware</i> e-Class untuk Memudahkan Siapa Saja Mengklasifikasi dan Memahami Sistem Klasifikasi Berbasis DDC <i>Rotmianto Mohamad</i> .....	55



# TIBANDARU

## JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

### Sekapur Sirih

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga pada bulan April tahun 2019 ini Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat menerbitkan Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 3 Nomor 1 April 2019.

Dengan terbitnya Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 3 Nomor 1 April 2019, besar harapan kami bawasanya Jurnal ini menjadi salah satu media kreativitas bagi pustakawan, dosen ilmu perpustakaan dan informasi untuk mengeksekusi cakrawala pengetahuannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Semakin banyak pustakawan, dosen ilmu perpustakaan dan informasi, dan pemerhati kepustakawanan yang produktif dengan menulis karya ilmiah maka akan menjadi sebuah keniscayaan sebuah eksistensi profesi ini dalam menyumbang gagasan keilmuan untuk kemajuan peradaban berbangsa dan bernegara.

Semoga Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 3 Nomor 1 April 2019 ini benar-benar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpustakaan dan informasi. Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang terlibat dalam penulisan Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 3 Nomor 1 April 2019 ini baik dari penulis maupun penerbit. Kami (Tim dan Penulis) tentunya banyak kekurangan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

**Tim Redaksi**

## Memposisikan Pustakawan di Perpustakaan Daerah dalam Pengembangan *E- Government*

Bambang Prakoso<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<sup>1</sup>Email : [bambangprakoso33@yahoo.co.id](mailto:bambangprakoso33@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

Regional libraries have a fundamental role in changing regional civilizations, Librarians become an important slice in realizing the role to be optimally active, in various library activities that have undergone various changes caused by the development of science and technology, really need adequate readiness to be able to meet community expectations. The development of e-government as one method to be able to maximize government business efficiency and can streamline the section relating to the service channel to the public, information dissemination is very fast and even, can reduce the cost of printing (publishing) by making an electronic version of the documents available, so it is possible to make cost savings. As for one of the many ways done is by building a website or government site on the Internet. Librarians who work in regional libraries are expected to be adaptive to the development of information technology to provide maximum service to users of regional libraries.

**Keywords:** *Librarian. Regional Library. E-Government*

### ABSTRAK

Perpustakaan daerah memiliki peran mendasar dalam mengubah peradaban daerah, Pustakawan menjadi irisan penting dalam mewujudkan perannya agar dapat aktif secara optimal, dalam berbagai kegiatan perpustakaan yang telah mengalami berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat membutuhkan kesiapan yang memadai untuk dapat untuk memenuhi harapan masyarakat. Perkembangan e-government sebagai salah satu metode untuk dapat memaksimalkan efisiensi bisnis pemerintah dan dapat merampingkan bagian yang berkaitan dengan saluran layanan kepada publik, penyebaran informasi sangat cepat dan genap, dapat mengurangi biaya pencetakan (penerbitan) dengan membuat versi elektronik dari dokumen yang tersedia, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penghematan biaya. Adapun satu dari sekian banyak cara yang dilakukan adalah dengan membangun situs web atau situs pemerintah di Internet. Pustakawan yang bekerja di perpustakaan daerah diharapkan akan adaptif dengan pengembangan teknologi informasi untuk memberikan layanan maksimal kepada pengguna perpustakaan daerah.

**Kata kunci:** *Pustakawan. Perpustakaan Daerah. E-Government*

#### A. PENDAHULUAN

Kehidupan konstelasi politik Negara dan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri telah mengalami berbagai

perubahan drastis sejak era reformasi. Saat ini daerah punya keleluasaan dalam mengembangkan semua potensi yang didaerah tersebut, dengan desentralisasi tugas dan tanggung jawab pemerintahan,

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah diimplementasikan dalam sistem administrasi publik, baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Implementasi kebijakan publik tersebut dalam kurun waktu 2001 - 2004 telah dievaluasi kembali dan kedua Undang-Undang tersebut kemudiandirevisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melihat substansi pemberlakuan undang-undang yang baru, nampak terjadi perubahan-perubahan dan improvisasi sehingga membawa perubahan-perubahan pula, pada tahapan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. (dalam Baktiyar 2017)

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga digunakan kembali asas umum penyelenggaraan negara yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asasefektivitas. Pencantuman kembali asas-asas umum penyelenggaraan negara di dalam Undang-Undang ini tidak lain ingin mereduksi konsep *good governance* dalam kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah Dharma Setyawan Salam (2004:107-1110).

Berangkat dari pemikiran diatas, maka penerapan kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi publik di daerah kabupaten/kota benar-benar menerapkan prinsip *good governance* serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi diharapkan mampu mendorong terjadinya layanan publik yang baik dan lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan publik yang dihasilkan, diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, guna menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan publik, yang menjadi kewajiban negara kepada warganya.

Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur melalui kualitas layanan publik yang semakin baik. Kebijakan desentralisasi yang hanya untuk menggantikan peran pemerintah pusat di daerah, tanpa melakukan perubahan pada transaksi sosial yang terjadi, maka sangat sulit untuk diharapkan terjadinya efek positif dari kebijakan publik tersebut. Oleh karenanya perbaikan kualitas layanan publik menjadi faktor yang utama dan determinan dalam realitas implementasi kebijakan desentralisasi.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk dapat menentukan sendiri focus dan arah pembangunan daerah. Optimalisasi

pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara lebih memanfaatkan semaksimal mungkin berbagai sumber daya yang dimiliki dan kemampuan para perangkat daerah.

Salah satu perangkat daerah yang sangat terkait dengan penyebaran informasi adalah perpustakaan daerah, sebagai dinas yang selama ini hanya dipersepsikan dan dianggap sebagai sumber bacaan umum, terutama yang bersifat hiburan serta kurang mendapat apresiasi. Dalam konsep pengembangan dan pembangunan daerah, maka perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, apabila dapat lebih diintensifkan fungsinya.

Perpustakaan daerah mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu pusat rujukan sumber informasi pembangunan daerah. Dalam segala aktivitas kerjanya, perpustakaan telah mengaplikasikan dan memanfaatkan berbagai sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dalam memberikan layanan lebih cepat, murah, tepat, dapat dan efektif. Adapun Fungsi penyebaran informasi, kemudian dapat dikembangkan dan diintensifkan dengan pemberian layanan dalam model informasi yang beragam, sehingga sangat dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi perpustakaan.

Kompleksitas dalam pelayanan layanan jasa informasi menjadi semakin krusial, ketika prosedur pemberian layanan tersebut tidak dibakukan secara komprehensif dan tidak ditetapkan dalam suatu standar pelayanan yang maksimal. Pelayanan jasa informasi tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat

(pemustaka), apabila dalam pelaksanaannya tidak kolaborasi dan berjalan sendiri-sendiri dalam sektornya masing-masing.

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam pokok bahasan tulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan *E-government* di perpustakaan daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai layanan publik dalam menyediakan layanan jasa informasi terhadap masyarakat.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Teknologi Informasi Dalam Tata Kerja Pemerintahan.**

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sangat dinamis, dengan hadirnya internet yang telah dimanfaatkan pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Adanya introduksi dan adopsi berbagai inovasi berupa teknologi informasi dan komunikasi (ICT), maka membawa perubahan-perubahan sosial pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tak dapat dielakkan dan dibendung lagi. Perubahan-perubahan sosial dan politik sebagai akibat dari aplikasi ICT, mengakibatkan suatu pemerintahan harus mampu beradaptasi dan dapat memanfaatkan dengan baik terhadap aplikasi ICT dalam dunia tata kerja.

Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (*electronic government, e-government*). Hampir seluruh negara di dunia ini sudah mulai mencoba mengadaptasi, mengintroduksi, mengadopsi perkembangan internet dengan

mengimplementasikan sistem informasi, yang sangat diyakininya merupakan bentuk dari *e-government*. *E-Government* diyakini merupakan perbatasan berikutnya (*next frontier*) yang harus dijelajahi dan dijajaki dalam menggunakan internet, untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara prima, serta memiliki potensi terbesar untuk dapat merevolusi penyelenggaraan pemerintahan dan merevitalisasi demokrasi. (The Council for Excellence in Government, 2000).

## 2. Revitalisasi Pemerintahan dengan penerapan *E-Government*

Berbagai terminologi *e-government* telah dikemukakan oleh berbagai lembaga institusi pemerintahan dan juga organisasi internasional. Salah satunya, pendapat yang berwujud pernyataan cukup baik untuk mendefinisikan *e-government* dikeluarkan oleh World Bank (2001):

*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the (1) ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends, (2) better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, (3) citizen empowerment through access to information, or more, (4) efficient government management. The Resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience,*

*revenue growth, and/or cost reductions.*

Masih terdapat beberapa definisi lainnya, dengan menggunakan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda dinyatakan di dalam Tambourin (et.al) (2001:367-376), mulai dari "*e-business of the state*", pelayanan kepada penduduk dan rekayasa ulang (*re-engineering*) dengan memanfaatkan ICT, atau usaha pemenuhan kebutuhan publik dengan memanfaatkan Internet. Sementara itu sangat terkait dengan bidang administrasi public, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *e-government* sebagai: memanfaatkan internet dan world-wide-web untuk mengirimkan informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat. (UN-DPEPA, 2002) Sangat terlihat dengan jelas sekali, bahwa interpretasi tentang *e-government* menjadi semakin meluas dan menyebar. (Krenner J, Wimmer M., 2001:329-337).

*E-government* dapat dipandang sebagai suatu visi dan misi disiplin sebagai mentor untuk seluruh sektor administrasi dan pemerintahan. Dalam pembahasannya ternyata; wilayah keberadaan *e-government* dapat dipandang dan dibahas dalam skala besar dan dalam skala kecil. Dalam skala besar *E-Government* adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan administrasi termasuk *e-democracy*, *e-voting*, *e-administration*, *e-assistance*, *e-justice*, bahkan *e-healthcare* atau *e-education*. Sedangkan pada skala kecil, *e-government* adalah implementasi proses administrasi lokal dalam domain *e-administration*.

Harapan yang muncul dari revolusi digital adalah memanfaatkan secara

maksimal potensinya, untuk menguatkan demokrasi dan membuat pemerintah lebih responsiveterhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai layanan publik. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan akuntabilitasnya terjaga. (Center for Democracy and Technology: 2005). Dalam *E-governmentsangat* memungkinkan untuk dapat melakukan transaksi yang berhubungan erat dengan sistem pemerintahan, setiap saat dan darimana pun seseorang berada. Masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkannya dan melakukan aktivitas yang partisipatif dan proaktif. Orang-orang di dalam pemerintahanbekerja dengan sangat antusias dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda antara lain; menjawab pertanyaan dengan tangkas dan cepat, menggunakan jaringan untuk dapat melayani publik secara tepat. Sementara itu institusi swasta, dapat menikmati interaksi yang cepat dan mudah, sehingga dapat meningkatkan perhatian publik terhadap produk-produk yang dihasilkannya.

Pengembangan *e-government* dimaksudkan sebagai salah satu metode untuk dapat memaksimalkan efisiensi bisnis pemerintahan, serta dapat mengefektifkan bagian yang berhubungan dengan saluran layanan (*services*) kepada publik, penyebaran informasi (*information dissemination*)sangat cepat dan merata, dapat mengurangi biaya cetak (*publishing*) dengan membuat versi elektronik dari

dokumen-dokumen yang tersedia, sehingga sangat memungkinkan dapat melakukan penghematan biaya. Adapun salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan membangun portal atau situs pemerintahan di Internet.

Memang, perkembangan *e-government* di Indonesia sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak kendala yang muncul mulai dari ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, kondisi sosial politik, sampai dengan keberadaan aplikasi sistem informasi yang spesifik yang dapat digunakan. Selain itu harus diakui bahwa keberadaan berbagai peraturan, petunjuk dan informasi mengenai *e-government* masih belum memadai.

### 3. Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Menuju *E-Government*

Dalam proses organisasi, selalu terdapat pengaruh lingkungan yang juga harus diperhitungkan dengan seksama. Pengaruh lingkungan seringkali berhubungan dengan pembagian pekerjaan atau job diskripsi dalam proses organisasi. Disamping pengaruh lingkungan, dalam organisasi terdapat juga pengaruh yang lainnya yaitu lingkungan masyarakat dan alam. Di dalam sistem administrasi/ birokrasi Negara sangat jelas bahwa masukan (*input*) untuk proses politik adalah:

1. (informasi) kebutuhan masyarakat dan Negara
2. Sumber daya manusia dan alam,
3. Peran serta masyarakat.

Sementara hasil dari proses atau keluaran (*output*) adalah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan.Disinilah kata

kunci informasi dan peran serta masyarakat berpengaruh dalam mengembangkan administrasi/birokrasi Negara yang efektif dan efisien dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik (lihat Osborne, 1996).

Siagian (2003) menyatakan pentingnya peranan informasi dalam kehidupan modern dewasa ini, sehingga masyarakat yang mengolah informasi secara “tradisional” dalam arti tidak menggunakan sarana bermuatan teknologi tinggi disebut masyarakat prainformasional untuk kata lain masyarakat yang belum maju. Sebaliknya masyarakat yang mengolah berbagai komponen penanganan informasi dengan memanfaatkan kemajuan ICT disebut sebagai masyarakat informasional. Dapat dikatakan pula bahwa untuk pemerintahan informasional adalah pemerintahan yang mengolah penanganan informasi dengan menggunakan ICT.

Ada beberapa ciri masyarakat informasional yang cukup penting adalah jumlah informasi yang melimpah, transmisi informasi yang cepat, lingkup informasi yang luas, biaya pengadaan murah, mobilitas informasi, jangkauan informasi terbuka, cara penyampaian informasi lewat banyak media, unit penanganan informasi terutama menggunakan mesin, dan akses informasi yang luas.

Konsep *e-government* yang dijadikan sebagai acuan, maka harus melihat dulu bagaimana proses pengolahan informasi sangat berpengaruh dalam kinerja pemerintahan, serta mengubah proses layanan kepada masyarakat. Apabila proses informasional yang terjadi hanya bersifat otomastisasi proses-proses di dalam pemerintahan, tetapi tidak memberikan

transparansi pada proses administrasi Negara dan tidak membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan, maka *e-government* tidak terlaksana. Begitu juga sebaliknya, apabila *e-government* merupakan suatu proses antara, maka proses ini harus didahului oleh sebuah proses pemerintahan informasional, karena syarat utama terciptanya *e-government* adalah sangat sarat dengan penggunaan ICT, maka proses informasional mutlak harus terjadi lebih dulu.

## C. METODE KAJIAN

### 1. Obyek Kajian.

Obyek kajian berintikan pada pembahasan dengan melakukan kajian mendalam tentang, persiapan pustakawan dalam penerapan *e-government*. Sumber daya manusia atau pustakawan harus adaptif terhadap perkembangan ICT untuk memberikan layanan yang maksimal terhadap pengguna perpustakaan.

### Ruang Lingkup Dan Fokus Kajian.

Ruang lingkup kajian berfokus pada kesiapan sumber daya manusia (pustakawan) dalam penerapan *e-government*. Dalam dunia kerja pustakawan selalu menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi pemustaka. Kepuasan pemustaka akan menghasilkan loyalitas pengguna yang tinggi sehingga informasi yang disajikan perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemustaka. Dalam kerja pustakawan selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan pimpinan, pemustaka, sesama pustakawan dan

masyarakat, sehingga ketrampilan berkomunikasi dan berbahasa dapat membantu pustakawan untuk meraih kembali terhadap peluang yang dianggap telah hilang.

## 2. Metode Kajian

Pemikiran kritis (*critical thinking*) dan realitis terhadap pengaplikasian pemikiran sebuah konsep dalam suatu kurun waktu yang telah dan sedang terjadi, secara metodologis kajian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Kajian sejarah memiliki ciri yang dominan yaitu merupakan penelitian kritis mengenai perkembangan pemikiran baik di jaman dahulu maupun sekarang dengan menggunakan data primer yang dianggap sebagai sumber informasi primer. Metode kajian yang digunakan dalam penemuan data yang berisikan informasi penting adalah kajian perpustakaan atau studi pustaka (*library research*).

## 3. Konseptualisasi Dan Analisis Kajian

Perwujudan kesiapan dan kesiapan pustakawan dalam e-government, sesungguhnya adalah menyeimbangkan dari gabungan kesiapan dan persiapan para pustakawan dan perpustakaan daerah dalam untuk berperan aktif sebagai aktor penggerak *E-Government*, yang terejawantahkan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam dunia pemerintahan. Menselaraskan antara keinginan, kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta profesionalisme pustakawan dalam *E-Government*, secara realitasnya tidaklah segampang membalikan telapak tangan, melainkan

ditempuh melalui proses yang sangat panjang dan penuh dengan tantangan, rintangan dan hambatan. Namun demikian apabila pustakawan teguh, ulet dalam perjuangannya, maka pada akhirnya diperoleh wujud nyata yaitu kepercayaan masyarakat dan pemerintah bahwa perpustakaan dapat dan mampu sebagai *E-Government*.

Analisis kajian terhadap kesiapan dan persiapan pustakawan dalam mewujudkan perpustakaan sebagai *E-Government*, dilakukan dengan menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Adapun sumber analisa berasal dari kajian sumber informasi berupa bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. Di samping itu, juga dilakukan analisis isi (*content analysis*). Analisa isi dimaksudkan untuk melakukan analisa terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan konsep kesiapan dan persiapan pustakawan dalam mengambil kesempatan untuk dapat mewujudkan perpustakaan sebagai *E-Government*, serta aplikasinya tata kerja di pemerintahan. Observasi atau pengamatan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung konstruksi teoritis, khususnya mengenai makna kesiapan dan persiapan pustakawan, perkembangan dan peledakan teknologi informasikomunikasi dan makna dari perkembangan dan pengembangan *E-Government*.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Perpustakaan Daerah sebagai Lembaga Penyedia Informasi Pemerintahan Daerah dengan Penerapan *E-Government*

Perkembangan teknologi yang sangat dinamis dan didukung oleh perkembangan ICT, menyebabkan produksi informasi melimpah sampai muncul istilah gelombang infotmisi. Informasi yang telah dihasilkan oleh proses pembangunan dan pemerintahan di daerah sebagian besar berupa data.

Berbagai data yang ada dalam pemerintah antara lain; data Statistik daerah, data pendidikan, data proyek-proyek pembangunan, data staf kepegawaian daerah, informasi program bidang lingkungan, bidang penataan pendidikan, kepariwisataan, hasil penelitian dan sebagainya. Membiarkan informasi, data dan berbagai laporan yang berada di berbagai instansi pemerintah, membuat pengguna kesulitan dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan, apalagi untuk berbagai laporan yang sifatnya lintas sektoral. Mengumpulkannya di dalam suatu unit layanan informasi yaitu perpustakaan, akan lebih dapat menjamin keberadaan sumber informasi tersebut dalam segi eksistensi, verifikasi dan klasifikasinya, sehingga dapat membrikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukannya.

Peran perpustakaan dan pustakawan adalah membantu pencarian informasi pemerintahan dan untuk mendapatkan informasi, dengan cara penelusuran informasi dapat efisien dan efektif. Salah satu model penyebaran layanan jasa informasi dalam *e-government* adalah disediakan sebuah akses tunggal terstruktur berupa portal pemerintah, yang dapat diakses dengan berbagai peralatan ICT, terutama menggunakan teknologi Internet. (Wawan Wiroadmaja, Journal Pustakawan Indonesia, Vol.6. No.1)

Perpustakaan daerah punya kewajiban sebagai administrator system informasi, yang memiliki peran untuk mengatur pengumpulan, pengolahan, ddvan pendistribusian informasi pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan layanan jasa secara optimal pada masyarakat. Perpustakaan dapat memberikan kepada pengguna yang membutuhkan informasi yang up to date secara cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Peran perpustakaan dapat lebih maksimal lagi, sehingga dapat berfungsi sebagai patner, khususnya bagi institusi di luar pemerintahan untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang kredibel. Sebagaimana fungsi tradisionalnya, pustakawan dapat mengarahkan pencari informasi pemerintahan untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang sah, cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pustakawan dapat pula menyediakan informasi yang mungkin sangat bermanfaat, namun keberadaannya sering tidak kelihatan, seperti literature kelabu (*grey literature*). Perpustakaan Daerah kemudian tidak hanya menjadi sumber bacaan umum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat sumberdaya informasi khusus pemerintahan daerah. Suatu pemerintahan yang bervisi *e-government* akan sangat menyadari bahwa eksistensi perpustakaan, merupakan sebuah irisan penting dalam proses transformasi informasi dan komunikasi antara penyelenggara atau pemerintah dan masyarakat masyarakat akar rumput.

## **2. Transformasi Perpustakaan Daerah dalam Rangka Pengembangan E-Government**

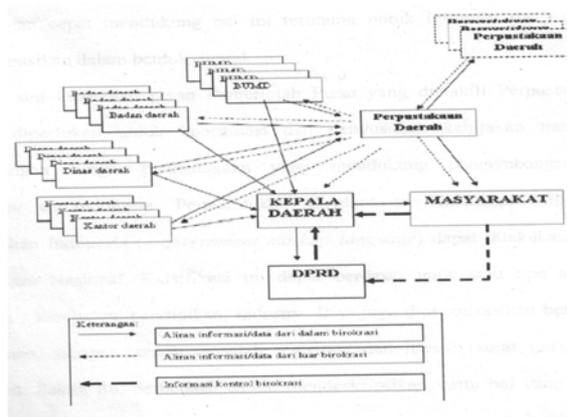
Perkembangan ICT semakin pesat dan berbagai kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks, pada akhirnya sangat berimplikasi kepada perubahan paradigma perpustakaan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Kondisi tersebut sangat menuntut adanya keberadaan SDM yang mumpuni, sebagai penyedia, pengelola informasi dan dokumentasi yang professional, berkompoten serta memahami secara maksimal terhadap pemanfaatan ICT. Dalam konsep *e-government*, jelas bahwa pemanfaatan ICT merupakan prasyarat utama untuk dapat terciptanya sebuah pemerintahan yang ideal.

Teknologi informasi dan komunikasi diaplikasikan di dalam system internal pemerintahan serta sebagai suatu sitem eksternal untuk berhubungan dengan pelayanan padamasyarakat. Di dalam perpustakaan sendiri, proses internal yaitu; pengumpulan dan penemuan informasi, sudah seharusnya memanfaatkan ICT, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses temu kembali informasi. Adapun yang sangat berhubungan dengan para pencari informasi pemerintahan, perpustakaan juga dapat memberikan berbagai model informasi yang lebih fleksibel seperti; dengan menyiapkan koleksi digital seperti; e-book, JPG.

Pemahaman terhadap esensi suatu pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat sebagai syarat *e-government*, akan menyadarkan pihak penyelenggara pemerintahan untuk mengubah perpepsi mengenaieksistensisebuah perpustakaan. Berbagai instansi akan lebih

mudahmendistribusikan berbagai informasi dan data yang dihasilkannya, untuk kemudian dikelola perpustakaan. Kegiatan akan dapat lebih terfokus pada kegiatan internal pemerintahan di dalam instansi, untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses layanan informasi terhadap masyarakat.

Perpustakaan yang menerapkan *e-government*, selalu berupaya untuk memberikan layanan informasi yang maksimal terdapat masyarakat, mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait, yang dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Informasi biasanya berasal dari dalam pemerintahan untuk dimanfaatkan sesama instansi pemerintahan dan lembaga non pemerintah, (media massa, Internet dan media mainstream), yang kemudian dapat dugunakan sebagai pendukung proses pengambilan kebijakan pembangunan.



Gambar 1 : Fungsi perpustakaan daerah alam pengelolaan informasi/data internal dan eksternal dari pemerintahan

Sinergitas antara berbagai perpustakaan daerah yang bertujuan sama, sangat dimungkinkan untuk melakukan

tukar menukar sumber informasi dan data yang kemudian dapat dimanfaatkan bersama, memperkaya sumber informasi dan sebagai pembanding. Sebagai contoh, sebuah peraturan daerah yang terbukti berhasil diimplementasikan di suatu daerah, akan dapat diterapkan juga di daerah lain, apabila data-data pendukungnya tersedia secara lengkap. Kebijakan pembangunan tertentu yang telah ditetapkan dan dikeluarkan ternyata berhasil, maka dengan cepat dapat diimplementasikan di daerah lain, dengan catatan apabila pertukaran informasi dan data yang diwakili oleh perpustakaan daerah berjalan dengan baik.

Demikian pula, kontrol terhadap berbagai proses pembangunan dapat dilakukan bila ada pembanding yang valid, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya proyek yang tidak mengena atau menyentuh masyarakat atau proyek dilakukan dengan cara yang korup. Kemajuan ICT dapat dengan cepat dapat mendukung pembangunan daerah, terutama memanfaatkan informasi yang dapat ditransformasikan dan diformulasikan dalam bentuk digital.

Peran Pemerintah Pusat yang diwakili Perpustakaan Nasional, sangat diperlukan untuk melakukan adanya suatu koordinasi dan penyusunan kebijakan nasional, tentang pengembangan fungsi perpustakaan yang mendukung pengembangan *e-government* di Indonesia. Pembentukan standard klasifikasi informasi pemerintahan Indonesia (*e-government markup language*) dapat dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Adapun klasifikasi yang akan ditentukan dan ditetapkan, berdasarkan jenis atau tipe sektor, misalnya: pariwisata,

kebudayaan, pendidikan, kesehatan, industry, dan transportasi. Bisa juga diorganisasikan berdasar tipe layanan, sebagai contoh masalah registrasi dan lisensi (surat ijin), atau pemesanan. Selain itu, berbagai perbedaan dalam mendeskripsikan suatu hal yang sama antar lembaga pemerintahan dan pengguna, harus juga diselesaikan. Memiliki kesamaan pemahaman atau kesamaan persepsi sangat penting, mengingat terdapat berbagai perbedaan dalam kewenangan lembaga pemerintahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sedangkan kebutuhan administrasi dan kebutuhan masyarakat, sangat sering menyebabkan suatu lembaga pemerintah sangat perlu untuk melakukan interaksi dan kerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan yang berwenang.

Penemuan informasi juga harus menjadi perhatian tersendiri, dimana sangat diperlukan suatu system klasifikasi yang konsisten dari setiap informasi yang disediakan pada setiap badan atau lembaga pemerintah. Hasil dari system ini adalah sebuah catalog yang terintegrasi dan informasi yang tersedia, kemudian dapat disebarluaskan ke seluruh pemerintah daerah, untuk dimanfaatkan oleh unit pengelola informasi perpustakaan daerah. Sebagai contohnya, bila membutuhkan informasi tentang "perijinan", maka perpustakaan dapat memberikan alternatif pilihan seperti perijinan bangunan (IMB), kesepakatan perdagangan (usaha) atau perijinan kendaraan (SIM atau STNK) dan lain-lainnya.

Memang pada bentuk ideal dari *e-government* adalah proses transformasi informasi dan pendistribusianya,

sepenuhnya sangat sarat menggunakan saluran ICT tanpa perlu memandang adanya keterbatasan pada ruang dan waktu (akses Internet). Namun demikian, bentuk antara seperti yang dapat dilakukan dengan membuat titik-titik akses informasi pemerintahan di perpustakaan daerah, yang pada akhirnya akan menjadi sangat bermanfaat, untuk dapat menciptakan satu kesatuan informasi pemerintahan nasional yang ideal, manakala semua permasalahan akses dan infrastruktur telah terpenuhi dengan baik.

### **3. Kesiapan Pustakawan Dalam E-government**

Pustakawan untuk dapat berperan aktif secara optimal, dalam berbagai aktivitas perpustakaan yang telah mengalami berbagai perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat memerlukan kesiapan-kesiapan yang memadai agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Apalagi setelah terjadinya reformasi, dimana terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis pada konstelasi politik ditubuh pemerintahan dan negara. Dampak perubahan yang terjadi berskala luas dan menyeruak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesiapan yang harus dimiliki pustakawan itu adalah kesiapan memiliki kompetensi, keahlian, ketrampilan, kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya dengan baik, sehingga citra perpustakaan semakin meningkat baik dan penguatan citra perpustakaan semakin kokoh tak tergoyahkan eksistensinya.

Menurut pendapat Agung Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah standart bagi individu untuk menangani tugas khusus, yang merupakan kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja sehingga mampu menghasilkan pekerjaan menjadi lebih baik.”

Harapan masyarakat menuntut kinerja pustakawan harus optimal, dalam memberikan layanan jasa informasi kepada pemakai. Oleh karenanya pustakawan harus memiliki kompetensi yang tinggi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lasa HS (2008), agar supaya pustakawan mampu berpartisipasi secara maksimal, maka diperlukan lima kompetensi pada diri pustakawan :

1. Kompetensi personal, adalah kompetensi yang wajib dimiliki seseorang berupa kemampuan pribadi yang didapat dari pengalaman, pendidikan, dan bersifat pribadi. Tujuan memiliki kompetensi ini supaya pustakawan memiliki kemampuan dalam minat intelektual, budaya, rekreasional, berbahasa asing, komunikasi lisan maupun tertulis, antusias pada perbukuan dan jiwa kepemimpinan.
2. Kompetensi manajemen, ialah kemampuan pustakawan dalam menguasai manajemen perpustakaan dengan baik
3. Kompetensi pendidikan, adalah kemampuan mendorong dan

membimbing pemustaka untuk mandiri dalam akses informasi dan pemanfaatan bahan informasi dalam usaha meningkatkan diri.

4. Kemampuan pelayanan, adalah kemampuan memberikan dan menyediakan segala jenis pelayanan informasi yang diberikan oleh perpustakaan.
5. Kompetensi ilmu pengetahuan adalah kemampuan pustakawan untuk mengelola perpustakaan dengan basis ilmu pengetahuan yang memadai yaitu ilmu perpustakaan. Selain itu juga ilmu-ilmu lain yang erat berkaitan dengan ilmu perpustakaan antara lain; ilmu informasi, psikologi, sosiologi, teknologi informasi dan lain sebagainya.

Kompetensi pustakawan menjadi sangat utama untuk dapat membangun citra positif perpustakaan. Sebagaimana *The Special Librarians Association* memberikan beberapa kompetensi pustakawan, baik pustakawan negeri, umum, akademik maupun swasta. Adapun daftar kompetensi pustakawan, diantaranya; (1). Mempunyai pengetahuan tentang evaluasi dan sumber daya memilih informasi (2). Memiliki wawasan pengetahuan subyek khusus (3). Memberikan layanan prima, dapat diakses dan layanan informasi yang efektif (4). Memberikan intruksi yang jelas dan empati pada pemustaka. Menurut Pendit (2008:7) menyatakan bahwa biasanya kompetensi didukung oleh ketrampilan dan keahlian spesifik yang menyangkut di tempat kerja, diantaranya sebagai berikut;

1. Melakukan pekerjaan (*task skill*): melakukan tugas-tugas rutin dalam pekerjaan.
2. Mengelola pekerjaan (*task management skill*): mengelola sejumlah tugas yang tidak sama dalam pekerjaan.
3. Mengantisipasi kemungkinan (*contingency management skill*): meminimalisir problem yang timbul.
4. Mengelola lingkungan kerja (*job/role environment skill*): tanggung jawab dan harapan atau tempat kerja, termasuk kerjasama dengan pihak lain.
5. Beradaptasi (*transfer skill*): mengadaptasi atau mentransfer pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang dimiliki ke dalam situasi baru.

Kompetensi pustakawan tidaklah mudah dicapai seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus ada upaya serius dan optimal untuk meraihnya. Dalam membangun kompetensi menurut Purwono (dalam Baktiyar 2017) pustakawan harus memiliki kecakapan sebagai berikut:

#### 1. *Adaptability*

Daya adaptasi harus dimiliki pustakawan untuk cepat melakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang mengalami berbagai perubahan secara cepat. Paradigma lama tidak perlu dipertahankan dan sudah saatnya ditinggalkan menuju paradigma baru. Adaptasi terhadap aplikasi teknologi informasi komunikasi harus dilakukan secepatnya, karena pelayanan jasa informasi sudah menggunakan internet, sehingga informasi yang up

to date segera sampai pada pemustaka yang membutuhkannya. Apalagi dewasa ini, informasi semakin cepat datangnya dalam hitungan detik, sehingga terjadi adanya banjir bandang informasi di dalam kehidupan masyarakat.

2. *People Skill (soft skill)*

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh pustakawan, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam memberikan layanan jasa informasi pustakawan selalu melakukan interaksi dengan pemustaka, maka faktor komunikasi sangat urgen untuk dapat memberikan kesan yang baik pada pemustaka. Kemampuan melakukan strategi komunikasi dalam komunikasi efektif akan dapat merubah citra negatif perpustakaan.

3. *Positive thinking*

Pustakawan seyogyanya selalu berpikiran positif dan tidak pesimis, selalu mengembangkan sikap yang fleksibel terhadap berbagai perubahan-perubahan yang selalu terjadi begitu cepat, yang kadang-kadang tidak terprediksi sama sekali.

4. *Personal addedvalue*

Pustakawan tidak hanya melukan pekerjaan rutin saja, tetapi juga memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian (skill), kemampuan, ketrampilan, dan penguasaan aplikasi teknologi informasi komunikasi, sehingga pustakawan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.

5. Berwawasan *enterprenuership*

Membanjirnya informasi dalam kehidupan masyarakat pada dewasa ini, merupakan suatu peluang bagi pustakawan, sehingga sangat perlu soft skill lietrasi informasi. Apa yang dinamakan informasi sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat mahal harganya, dan informasi di masa-masa yang akan datang akan dikejar-kejar untuk mendapatkannya, sehingga jual beli informasi akan menjadi sebuah kewajaran dan dimaklumi oleh masyarakat. Pustakawan harus mulai berfikir untuk *enterprenuership* demi eksistensi perpustakaan dan pustakawan.

6. *Team work-sinergi.*

Sudah tidak jamannya lagi pustakawan bekerja secara egoistik, sebab di era globalisasi informasi sangat dibutuhkan kerja sama dengan pustakawan lainnya. Membentuk *team work* yang sinergis menjadi modal utama dalam keberhasilan pengadaan, mengelola, melayani dan menyebarkan informasi pada kehidupan masyarakat.

Berbekal kompetensi, ilmu pengetahuan, kemampuan, kecakapan/ketrampilan yang dimiliki itu, maka pustakawan dapat berkerja secara optimal menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya, sehingga dapat memperkuat dalam meningkatkan citra perpustakaan di dalam masyarakat. Namun demikian tantangan yang dihadapi pustakawan, pada saat ini dan di masa akan datang, bukan semakin kecil tetapi tantangan yang ada semakin membentang luas, yang diakibatkan terjadinya

perubahan-perubahan masyarakat .yang semakin cepat dan tak terduga sebelumnya.

## E. PENUTUP

### a. Simpulan

1. Eksistensi Dinas Perpustakaan Daerah,dapat menjadi salah satu irisanpenting dalam pengembangan dan perkembangan implementasi *e-government* di daerah, sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perpustakaan Daerah sebagai pusat akses sumber informasi dan komunikasi pemerintahan, selain menjalankan tugas umumnya sebagai sumber bacaan bagi masyarakat. Transformasi visi misi perpustakaan daerah adalah sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan bervisi *e-government*, sehingga tercipta suatupemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan informasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Kesiapan pustakawan sangat dibutuhkan sebagai aktor penting dalam e-government. Peluang dalam *e-government* masih sangatterbuka dan mungkin dapat direalisasikan edngan baik, apabila pustakawan memiliki kesiapan-kesiapan yang matang dan sangat mumpuni dalam *e-government*, terutama kesiapan dalam penguasaan teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- (CDT), C. D. and T. (n.d.). E-Government Handbook. Retrieved March 3, 2015, from <http://www.cdt.org/egov>
- Bakhtiyar. (2017a). Kesiapan dan Persiapan Pustakawan untuk Berjuang Merebut dan Merengkuh Peluang yang Dianggap telah Hilang. *TIBANDARU : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(2).
- Bakhtiyar. (2017b). Peran Pemimpin Menciptakan Sinergitas Kerja dalam Pelayanan Publik Bidang Informasi. *TIBANDARU : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*2, 1(1).
- Handayaniingrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Lasa HS. (2008). *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gramedia.
- Nugohohadi, A. (2013). Menakar Peranan Dalam Implementasi Teknologi Informasi Di Perpustakaan. *Jurnal Khazanah Al-Hikmah*, 1(1).
- Osborne & Gaebler. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Peressindo.
- Pendit, P. L. (2008). Kompetensi Informasi dan Kompetensi Pustakawan. *Makalah Lokakarya Pustakawan Swasta Se Jabodetabek. Jakarta 14-15 Januari*.

- Purwono. (2013). *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salam, D. S. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Siagian SP. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Special Library Association. (1996). Competencies for Special Librarians of the 21 Century Submitted to the Board of Directors by the Special Committee on Competencies for Special Librarians.
- Sughanda D. (1989). *Pengantar Admistrasi Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Suradinata E. (1994). *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan*. Bandung: Ramadhan.
- Tambouris E. Gorilas S. & Boukis G. (2001). Investigation of Electronic. In *Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics; Nicosia, Cyprus* (pp. 367–376). Nicosia: Panhellenic Conference on Informatics.
- The Council for Exelence in Governme (CEG). (2003). *E-Government The Next American Revolution*. Intergovernmental Technology Consotium. Retrieved March 1, 2019, from <http://www.excelgov.org>.
- United Nations Division for Public Economics and Public Economic and Public Administration (UN-DPEPA). (2002). *Benchmarking E-Government : A Global Perspective*. New York: America Society for Public Administration.
- Wimmer M. Krenner J. (2001). An Integrated Online One-Syop Government Platform: The eGOV Project. In Hofer. In *9th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings, Schriftenreihe Informatik* (pp. 329–337). Linz: Universit ksverlag Trauner.
- Wiraatmaja, W. & K. B. S. (n.d.). Memposisikan Perpustakaan Daerah dalam Pengembangan E-Government di Indonesia. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 6(1).
- World Bank. (n.d.). A Definition of E-Government. Retrieved March 3, 2019, from <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov.htm>.